



**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA SKPD)**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BATANG T.A. 2019**

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

2018

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2019 telah dapat diselesaikan.

Penyusunan Renja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang ini dilaksanakan guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan disahkan Renja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2019 ini, diharapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Batang, 25 Juli 2018

KEPALA DPRKP
KABUPATEN BATANG

ARI YUDIANTO, SH
NIP. 19651107 199003 1 005

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2017	8
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Batang Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM	8
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	20
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	24
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	28
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	28
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang	30
	3.3. Program dan Kegiatan	32
BAB IV	PENUTUP	33

LAMPIRAN TABEL

1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017
2. Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2019 Kabupaten Batang
3. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Batang
4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 mengacu pada perencanaan nasional dan provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program - program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Batang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja (RENJA SKPD) DPRKP Kabupaten Batang adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2018 oleh DPRKP Kabupaten Batang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Rencana Kerja (RENJA SKPD) DPRKP Kabupaten Batang disusun berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) DPRKP Kabupaten Batang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRKP Kabupaten Batang dalam menjalankan visi jangka menengah daerah.

Visi dan Misi Rencana Jangka Menengah Daerah

Visi untuk membangun Kabupaten Batang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Batang tahun 2011-2022 adalah: “ Terwujudnya Kabupaten Batang yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tenteram dan Sejahtera Pada Tahun 2022”. Perwujudan visi tersebut mengandung filosofis bahwa Batang sebagai suatu daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus mampu mengoptimalkan segala potensi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya melalui pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan bertumpu pada kekuatan perekonomian daerah.

Misi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan.

Rumusan misi dalam rancangan dokumen RPJM daerah ini sebagai penjabaran atas visi “Terwujudnya pemerintahan yang efektif, bersih, profesional, untuk penguatan ekonomi daerah, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Batang” adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis eGovernment didukung pengembangan kerjasama.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu.
3. Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
4. Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan RENJA SKPD DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2007-2025;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2012 – 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Batang Tahun 2014;

19. Peraturan Bupati Batang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2018.
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1. Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan, terutama yang diampu oleh DPRKP Kabupaten Batang.
2. Terciptanya efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, khususnya yang dilaksanakan oleh DPRKP Kabupaten Batang.

1.3.2. Tujuan

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan oleh DPRKP Kabupaten Batang pada tahun anggaran 2018

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan RENJA SKPD DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan RENJA SKPD SKPD DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2019

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA SKPD DPRKP, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra DPRKP serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan RENJA SKPD DPRKP

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA SKPD DPRKP

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA SKPD DPRKP serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD DPRKP Tahun 2016

Bab ini memuat review kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD DCKTRESM Tahun 2016 dan perkiraan Renja DPRKP Tahun 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD DCKTRESM Tahun 2016 dan Capaian Renstra DCKTRESM sampai dengan Tahun 2016

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD DCKTRESM tahun 2016 dan realisasi Renstra DCKTRESM mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DCKTRESM

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan DCKTRESM berdasarkan indikator yang sudah ditentukan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DCKTRESM

Bagian ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan DCKTRESM, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap visi/misi, tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2019

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPRKP Kabupaten Batang

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD DPRKP Kabupaten Batang

Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKP yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPRKP

3.3. Program dan Kegiatan

Bagian ini menguraikan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DPRKP TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD DPRKP Tahun 2017 dan Capaian Renstra DPRKP

Rencana Kerja suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA SKPD DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap RENJA SKPD DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2017 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja SKPD DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2019, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

- a. Masalah - masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran - sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan - kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja SKPD DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2019 juga memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2019;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

❖ Evaluasi Program Tahun 2017

Pada tahun 2017 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang mendapatkan *Anggaran sebesar Rp. 16.603.639.937,00 terdiri dari Rp. 2.981.137.937,00 (Belanja Tidak Langsung) dan Rp. 13.622.502.000,00 (Belanja Langsung), namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 15.418.595.576,00 atau 92,86% terdiri Rp. 2.967.788.001,00*

(Belanja Tidak Langsung) atau 99,55% dan Rp. 12.450.807.575,00 (Belanja Langsung) atau 91,40%, sehingga terdapat efisiensi sebanyak 7,14%.

Hasilnya evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1) *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*

1. *Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (100%)*
2. *Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100%)*
3. *Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (100%)*
4. *Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (100%)*
5. *Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (100%)*
6. *Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100%)*
7. *Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100%)*
8. *Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (100%)*
9. *Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (100%)*
10. *Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman kantor (100%)*
11. *Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (100%)*
12. *Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD (100%)*

2) *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*

1. *Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (100%)*
2. *Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (100%)*
3. *Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (100%)*

3) *Program Peningkatan Disiplin Aparatur*

1. *Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (100%)*
2. *Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (100%)*

4) *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*

1. *Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal (100%)*

5) *Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan*

1. *Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan(100%)*

6) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

1. Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (100%)

7) Program Pengembangan Perumahan

1. Kegiatan Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan (100%)
2. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (100%)

8) Program Lingkungan Sehat Perumahan

1. Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin (100%)

9) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

1. Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat (100%)
2. Kegiatan Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan (100%)

10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Kegiatan Penataan RTH (100%)
2. Kegiatan Pemeliharaan RTH (100%)

11) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1. Kegiatan perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (100%)
2. Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (93,8%)

12) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

1. Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air(100%)

13) Program Pengelolaan Areal Pemakaman

1. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman (100%)

Akuntabilitas Keuangan

Realisasi keuangan untuk masing-masing Program dan Kegiatan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Rp. 6.893.800,00)
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Rp. 81.599.537,00)
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Rp. 638.003.500,00)
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (Rp. 30.653.100,00)
5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (Rp. 40.197.500,00)
6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Rp. 31.120.000,00)
7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Rp. 59.391.000,00)
8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Rp. 5.060.000,00)
9. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Rp. 21.186.000,00)
10. Penyediaan makanan dan minuman (Rp. 29.632.500,00)
11. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Rp 91.832.482,00)
12. Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD (Rp. 151.200.000,00)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Rp. 200.248.519,00)
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Rp. 252.127.684,00)
3. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (Rp. 213.278.000,00)

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (Rp. 20.525.000,00)
2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (Rp. 25.502.000,00)

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal (Rp. 16.500.000,00)

5) Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

1. *Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Rp. 126.975.000,00)*

- 6) *Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong*
 1. *Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Rp. 2.052.254.800,00)*

- 7) *Program Pengembangan Perumahan*
 1. *Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan (Rp. 241.750.000,00)*
 2. *Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat. (Rp. 2.568.695.896,00)*

- 8) *Program Lingkungan Sehat Perumahan*
 1. *Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin (Rp. 372.730.689,00)*

- 9) *Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan*
 1. *Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat (Rp. 143.552.106,00)*
 2. *Kegiatan Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan (Rp 49.769.144,00)*

- 10) *Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)*
 1. *Kegiatan Penataan RTH (Rp. 501.703.500,00)*
 2. *Kegiatan Pemeliharaan RTH (Rp. 612.646.000,00)*

- 11) *Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya*
 1. *Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (Rp. 3.221.999.699,00)*
 2. *Kegiatan Perencanaan Pembangunan jaringan air bersih/air minum (Rp. 53.885.000,00)*

- 12) *Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku*
 1. *Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air (Rp. 154.878.119,00)*

13) Program Program pengelolaan areal pemakaman

1. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman (Rp. 435.017.000,00)

Tabel 2.1

**Rencana Anggaran dan Realisasi Penggunaan Anggaran DPRKP
Tahun Anggaran 2017**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	Anggaran	REALISASI
		Jumlah	Jumlah
1	2	3	4
	URUSAN WAJIB/WAJIB		
	DINAS CIPTAKARYA TATA RUANG DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
	Gaji dan Tunjangan PNS	2.981.137.937,00	2.967.788.001,00
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	Penyediaan jasa surat menyurat	10.270.000,00	6.893.800,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	109.200.000,00	81.599.537,00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	712.400.000,00	638.003.500,00
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	42.600.000,00	30.653.100,00
	Penyediaan alat tulis kantor	42.000.000,00	40.197.500,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	54.120.000,00	31.120.000,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	101.000.000,00	59.391.000,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	5.060.000,00
	Penyediaan bahan logistik kantor	26.120.000,00	21.186.000,00
	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000,00	29.632.500,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000,00	91.832.482,00
	Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD	158.400.000,00	151.200.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	Pengadaan peralatan gedung kantor	214.650.000,00	200.248.519,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	314.045.000,00	252.127.684,00
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	215.000.000,00	213.278.000,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	24.600.000,00	20.525.000,00
	Pengadaan pakaian kerja lapangan	26.150.000,00	25.502.000,00

4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
	Pendidikan dan pelatihan formal	17.074.500,00	16.500.000,00
7	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		
	Penyiapan tenaga pengendali kamanan dan kenyamanan lingkungan	135.980.000,00	126.975.000,00
8	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong		
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2.153.000.000,00	2.052.254.800,00
11	Program Pengembangan Perumahan		
	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	250.000.000,00	241.750.000,00
	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	2.691.696.900,00	2.568.178.896,00
12	Program Lingkungan Sehat Perumahan		
	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	380.237.000,00	372.730.689,00
14	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan		
	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	150.000.000,00	143.552.106,00
	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan	50.000.000,00	49.769.144,00
15	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		
	Penataan RTH	512.550.000,00	501.703.500,00
	Pemeliharaan RTH	655.500.100,00	612.646.000,00
16	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya		
	Perencanaan Pembangunan jaringan air bersih/air minum	54.100.000,00	53.885.000,00
	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	3.777.233.500,00	3.221.999.699,00
17	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku		
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air	168.575.000,00	154.878.119,00
18	Program pengelolaan areal pemakaman		
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	440.000.000,00	435.017.000,00
	JUMLAH BELANJA	16.603.639.937,00	15.418.078.576,00

❖ **Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2018**

Untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2018 dengan usulan sebesar Rp. 12.878.753.587,00 terdiri dari BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 2.910.322.187,00 BELANJA LANGSUNG Rp. 9.968.431.400,00 terurai dalam 13 program dan 36 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2017, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik kegiatan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Batang, pada dasarnya DPRKP Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang melekat guna mewujudkan Good Government di era otonomi daerah dimana mengharuskan kita untuk dapat merespon berbagai tuntutan dinamika global yang berubah sangat cepat dan sarat kompetitif, telah mempunyai konsep perencanaan yang komprehensif dan implemtatif yang akan dijadikan panduan (guidance) dalam melaksanakan pembangunan, bersinergi dan berintegrasi antara sektor /sub sektor.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2017, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPRKP sebagai berikut

1. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan pertamanan;
2. Masih kurangnya SDM di DPRKP Kab. Batang
3. Waktu pelaksanaan fisik pekerjaan seperti misal (Pengadaan Air Bersih) 80 hari kalender bertepatan dengan musim penghujan;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DPRKP dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra DPRKP Kabupaten Batang maka strategi dan kebijakan, sesuai dengan Misi 3 Kabupaten Batang, yang akan ditempuh DPRKP Kabupaten Batang pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan, pembinaan dan pengendalian perumahan serta pertanahan secara berkelanjutan
2. Penyehatan lingkungan dan pengembangan kawasan, penataan infrastruktur dan sarana prasarana permukiman serta pertamanan dan permukiman

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPRKP

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Prov. Jawa Tengah sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan Cukup Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dalam tahun 2017 sebesar 95,61%
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang menggunakan dana kurang dari dana yang dianggarkan. Hal ini berarti terjadi efisiensi 7,14% dari anggaran yang disediakan.

❖ Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sampai saat ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Batang.

Susunan Kepegawaian dan Sarpras

a. Susunan Kepegawaian :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang terdiri dari :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- III. Bidang Perumahan dan Pertanahan membawahi :
 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
 2. Seksi Pembinaan dan Pengenalian Perumahan
 3. Seksi Pertanahana
- IV. Bidang Perumahan Permukiman membawahi:
 1. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Kawasan
 2. Seksi Penataan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Permukiman
 3. Seksi Pertamanan dan Tempat Pemakaman Umum

Berdasarkan Perda Nomor 60 Tahun 2017, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan Tugas pembantuan yang diberikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
2. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
6. Pengelolaan teknis perizinan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
7. Pelaksanaan pelayanan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dengan mengacu pada Standart Pelayanan Minimal bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
8. Pelaksanaan administrasi DPRKP
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
10. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup DPRKP
11. Penyelenggaraan kesekretariatan DPRKP
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRKP

Potret kondisi atau gambaran umum pelayanan DPRKP Kabupaten Batang yang telah diuraikan sebelumnya, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Batang. Sehingga isu-isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pembangunan yang akan digulirkan.

Berdasarkan hal-hal diatas, beberapa isu strategis DPRKP Kabupaten Batang antara lain adalah :

1. Belum optimalnya pendayagunaan sarana prasarana dan kapasitas kelembagaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
Pendayagunaan sarana dan prasarana perkantoran serta kapasitas kelembagaan dirasakan masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemanfaatan sejumlah peralatan perkantoran secara efektif dan efisien maupun penggunaan peralatan perkantoran tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya.
Sedangkan penataan kapasitas kelembagaan masih dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada, selain penempatan personil (pegawai) yang kurang sesuai dengan kapasitas masing-masing pegawai tersebut (back ground pendidikan kurang sesuai dengan bidang tugas yang diemban)
2. Belum optimalnya penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
Penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dirasakan kurang optimal. Hal ini lebih disebabkan oleh dinamisnya tingkat kebutuhan masyarakat yang memerlukan aturan yang jelas, disamping cepatnya perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang kadang-kadang antara peraturan satu dengan yang lainnya saling tumpang tindih.
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Seiring dengan tuntutan untuk segera mewujudkan pemerintahan yang good governance dan clean government, kontribusi masyarakat (stakeholders) mutlak diperlukan. Hal ini diperlukan dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga asas keterbukaan dalam jalannya roda pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (stakeholders).

4. Belum optimalnya sistem dan manajemen pengelolaan data dan informasi secara profesional. Kebutuhan akan ketersediaan data dan informasi yang valid dan up to date dewasa ini adalah sesuatu yang mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan akan kebutuhan data dan informasi kepada stakeholders dan atau pengguna data baik dari lembaga pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten sampai dengan desa/kelurahan serta pihak swasta agar dapat menggunakannya untuk kepentingan masing-masing sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. DPRKP sebagai institusi penyedia dan pengolah data dan informasi tentang pembangunan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berupaya dengan keras untuk meningkatkan manajemen pengelolaan, penyajian dan publikasi data dan informasi hasil-hasil pembangunan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang lengkap dan berkualitas sehingga diharapkan pada akhirnya akan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam merumuskan program / kegiatan sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dapat tepat sasaran dan tepat manfaat.
5. Belum optimalnya peran dan fungsi penelitian dan pengembangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Kurangnya perhatian terhadap hasil-hasil penelitian sebagai masukan bagi pengambilan kebijakan dirasakan cukup memprihatinkan, ditengah semakin besarnya tuntutan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat sasaran yang didasarkan pada hasil kajian ilmiah (akademis). Hal ini akan diatasi dengan mendorong tumbuhnya kemitraan dan sinergi antara pelaku IPTEK guna lebih meningkatkan kegiatan

penelitian dan pengembangan tentang isu-isu strategis daerah serta penyediaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan guna menghasilkan suatu hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2019 mengacu pada Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Guna menghasilkan suatu rencana kerja SKPD yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (*review*) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2019. Adapun review rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) pada DPRKP Kabupaten Batang sebagai berikut :

- ✓ Program yang masuk Renstra dan masuk kedalam RKPD sebanyak : 8 Program
- ✓ Kegiatan yang masuk Renstra dan masuk kedalam RKPD sebanyak : 41 Program

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

DPRKP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan pembangunan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dan membantu Bupati Batang dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Bahwa proses perencanaan pembangunan daerah dimulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD dan musrenbang kabupaten, dimana sudah mengakomodir usulan program dan kegiatan dari

masyarakat. DPRKP sebagai lembaga yang melaksanakan pembangunan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berfungsi menampung dan mengakomodir hasil usulan dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJM Nasional Tahun 2015-2019 merupakan tahap ke-3 pencapaian visi dan misi RPJP Nasional 2025 dengan prioritas agenda pembangunan difokuskan pada pemantapan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan penekanan pada upaya :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Perkembangan kemampuan ilmu dan teknologi; dan
3. Penguatan daya saing perekonomian.

Tantangan eksternal yang dihadapi saat ini antara lain adalah meningkatnya ketidakpastian global terutama terkait harga-harga komoditi seperti bahan pangan, minyak dan gas bumi serta produk-produk ekspor dari hasil pertanian. Kondisi eksternal ini antara lain: gejolak politik di Timur Tengah ; krisis fiskal di Eropa, walau sudah menunjukkan gejala perbaikan namun efeknya masih tetap ada hingga saat ini; perubahan iklim dengan berbagai cuaca ekstrim; serta bencana alam di berbagai belahan dunia. Untuk mengatasinya perekonomian nasional perlu diperkuat dengan melakukan percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi dan dengan mengelola sumber-sumber secara berkelanjutan.

Tantangan dari lingkungan internal juga perlu mendapat perhatian setimpal. Angka kemiskinan telah berhasil diturunkan dari membaik, jumlah daerah tertinggal yang tersebar di berbagai wilayah masih cukup tinggi. Tantangan internal lainnya adalah kondisi infrastruktur yang belum memadai baik dalam hal ketersediaan, kehandalan, maupun kualitasnya serta efektivitas birokrasi yang belum optimal. Pembangunan nasional pada saat ini jelas masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan, pengangguran serta kesenjangan yang masih luas.

Di samping itu, percepatan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pada tahun 2012 perlu dijaga agar tidak kehilangan momentum. Strateginya adalah memperluas sumber-sumber pertumbuhan baik dilihat dalam dimensi regional

maupun sektoral. Sehingga kata kunci untuk strategi ini adalah perluasan dan percepatan pertumbuhan. Artinya pembangunan nasional (*growth with equity*) harus dapat dijabarkan ke dalam pencapaian pertumbuhan yang lebih tinggi dan menyebar secara luas. Oleh karena itu pembangunan 6 koridor ekonomi menjadi sangat penting untuk mewujudkan hal ini.

Tantangan yang dihadapi di tahun 2019 utamanya masih menyangkut peningkatan kesejahteraan yaitu kemiskinan, pengangguran, dan daerah tertinggal. Untuk mengatasinya perlu dibuka kesempatan kepada seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan status yang setara, terlepas dari latar belakang mereka. Namun, kebijakan ini perlu disertai dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat yang lemah dan tertinggal (*affirmative policy*) guna mengurangi kesenjangan kesejahteraan di masyarakat. Sehingga strategi pembangunan yang dipilih adalah pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan DPRKP Kabupaten Batang perlu diselaraskan dengan tujuan nasional. Pembangunan infrastruktur bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga memperbaiki kualitas permukiman.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) strategic goals yaitu: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal; b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk

mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja; c) meningkatkan kualitas lingkungan, yang bermaksud untuk mengurangi luas kawasan kumuh, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman dan meningkatkan pelayanan infrastruktur Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Penanganan bangunan gedung dan lingkungan telah diupayakan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui kegiatan sosialisasi/diseminasi peraturan bidang bangunan gedung dan lingkungan.

Di bidang penyehatan lingkungan diantaranya akan dilaksanakan dengan kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin serta kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan. Selain itu akan dilaksanakan pula penataan drainase dan pengelolaan persampahan.

DPRKP menangani pula kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan akan air bersih. Selain itu, penyediaan air minum berbasis masyarakat yang berpedoman pada Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat saat ini telah berkembang dengan pesat. Kegiatan penyediaan air minum berbasis masyarakat telah dilaksanakan di hampir seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan pendanaan yang bersumber dari anggaran pemerintah maupun pihak lain, seperti lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat (LSM), swasta (melalui kegiatan Corporate Social Responsibility) dan masyarakat. Namun dalam implementasinya masih menemui kendala yakni ketiadaan peraturan yang mengatur pola kerjasama pemerintah dan masyarakat. Faktor lainnya adalah kualitas sumber daya manusia pada lembaga pengelolanya juga masih rendah.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD DPRKP Kabupaten Batang

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

DPRKP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan pembangunan bidang Perumahan dan Permukiman dan membantu Bupati Batang dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mewujudkan pembangunan di bidang Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Batang. Untuk itu, disusun visi dan misi DPRKP yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan Renstra 2017-2022

Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang 2017-2022 adalah “Terwujudnya sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak guna peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam menunjang pembangunan”.

Pembangunan sarana dan prasarana bidang perumahan, permukiman dan pertanahan di Kab. Batang mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk pelayanan umum, penyediaan dan pengelolaan air bersih, sarana prasarana penyehatan lingkungan pemukiman serta sarana prasarana perumahan pemukiman agar fasilitas umum tersebut dapat dinikmati/ difungsikan oleh masyarakat dengan optimal.

Bidang Perumahan dan Permukiman

Pembangunan perumahan dan permukiman akan mengikutsertakan banyak aspek karena harus dilakukan dalam suatu kerangka perencanaan pembangunan terpadu dengan sector - sektor lain. Perubahan sosial ekonomi yang dapat membawa dampak berubahnya kondisi perumahan dimana perubahan kebutuhan perumahan dan permukiman tidak pernah menurun sementara disisi lain tidak diikuti dengan bertambahnya persediaan perumahan dan permukiman secara proporsional.

Ketidak proporsional antara permintaan dan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman antara lain adanya kendala keterbatasan lahan, kondisi sosial ekonomi masyarakat serta ancaman perubahan kondisi lingkungan bahkan kecenderungan degradasi lingkungan, berbagai hal tersebut sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius untuk ditangani agar tidak membawa dampak lanjutan yang merugikan berbagai pihak. Disamping itu pembangunan sarana dan prasarana air bersih juga harus senantiasa ditingkatkan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Batang.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan DPRKP tahun 2019 disusun berdasarkan pada tupoksi DPRKP Kabupaten Batang. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagaimana terlampir dalam Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2019.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2019 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. RENJA SKPD DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2019 menjadi acuan dan pedoman bagi DPRKP dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2019.

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, disamping sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan, maupun kelompok masyarakat lainnya, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan. Faktor - faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap sehingga hasil pembangunan menjadi optimal.

Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat, mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.

Batang, 25 Juli 2018

KEPALA DPRKP
KABUPATEN BATANG

ARI YUDIANTO, SH
NIP. 19651107 199003 1 00